

THE APPLICATION OF PEACE FINES IN SMUGGLING CRIME CASES IN THE JURISDICTION OF THE HIGH PROSECUTOR'S OFFICE OF THE SPECIAL CAPITAL REGION OF JAKARTA

Hengki Charles Pangaribuan* and Supriyadi**

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the basic considerations of the Jakarta Special Capital Region High Prosecutor's Office in applying peace fines in smuggling crimes. In addition, this research will also analyze the problem faced by Jakarta Special Capital Region High Prosecutor's Office in applying peace fines and the application of peace fines in the future.

This research is a type of empirical normative research supported by resource person interviews, as well as adopting library research by utilizing secondary data. Secondary data comes from primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection was conducted through the documentation method using document study tools. Data analysis was conducted qualitatively.

This research has two conclusions. First, the Attorney General's Office has the authority to resolve a case through an amicable fine mechanism as stipulated in the Prosecutor's Law and this authority has been applied through the DKI Jakarta High Prosecutor's Office in an oil smuggling case with the suspect CV Amin Market Jaya by considering restorative purposes and the amount of the amicable fine. Second, the application of peace fines by the DKI Jakarta High Prosecutor's Office opens up the potential for the application of peace fines in the future. However, there are several challenges including the absence of guidelines for the Jakarta High Prosecutor's Office in imposing peace fines.

Keywords: Peace Fines, Smuggling Crimes, Prosecutor's Office, Economic Crimes

* *Student of Master of Law Program (Litigation Law Concentration) Universitas Gadjah Mada Jakarta Campus*

** *Lecturer of Master of Law Program of Universitas Gadjah Mada Jakarta Campus*

PENERAPAN DENDA DAMAI TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Hengki Charles Pangaribuan* dan Supriyadi**

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam menerapkan denda damai dalam tindak pidana penyelundupan. Selain itu penelitian ini juga akan menganalisis problematika yang dihadapi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dalam menjatuhkan denda damai dan mengenai penerapan denda damai di masa mendatang.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif empiris yang didukung oleh wawancara dengan responden dan narasumber, serta mengadopsi penelitian kepustakaan dengan memanfaatkan data sekunder. Data sekunder berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan menggunakan alat studi dokumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Penelitian ini memiliki dua kesimpulan. Pertama, Kejaksaan Agung memiliki kewenangan untuk menyelesaikan suatu perkara melalui mekanisme denda damai sebagaimana dalam UU Kejaksaan dan kewenangan tersebut telah diterapkan melalui Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dalam kasus penyelundupan minyak dengan tersangka CV Amin Market Jaya dengan mempertimbangkan tujuan restoratif dan besaran denda damai. Kedua, penerapan denda damai oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta membuka potensi untuk diterapkannya denda damai di masa mendatang. Namun terdapat beberapa tantangan diantaranya belum adanya pedoman bagi Kejaksaan tinggi Jakarta dalam menjatuhkan denda damai.

Kata Kunci: Denda Damai, Tindak Pidana Penyelundupan, Kejaksaan, Tindak Pidana Ekonomi

* Mahasiswa Magister Ilmu Hukum (Konsentrasi Hukum Litigasi) Universitas Gadjah Mada Kampus Jakarta

** Dosen Program Magister Ilmu Hukum Kampus Jakarta (Supriyadi@ugm.ac.id)